

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang, Hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKDes) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat desa.
2. Berdasarkan indeks transparansi dalam model pengukuran penerapan good governance oleh Christian Ten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Karampa menyediakan akses dokumen yang tertata dengan baik untuk diperoleh oleh masyarakat. Juga memberikan kejelasan, integritas, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti papan nama dan papan akses informasi di beberapa lokasi. .. Sejak saat itu, Pemerintah Desa Karampa memiliki transparansi dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk beberapa elemen terkait termasuk masyarakat,

mulai dari perencanaan, saran, pelaksanaan dan penyampaian hasil pembangunan, dengan melibatkan masyarakat.

Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang transparan dengan melibatkan pemerintah kota, dan keberadaan dokumen, papan informasi dan poster memberikan informasi yang terkandung dalam total dana. buku APBDes.

5.2 Saran

1. Walikota perlu melatih, memperkenalkan dan mensosialisasikan perangkat desa terkait tata cara pengelolaan dana desa. Semoga perangkat desa memiliki pengetahuan untuk mengelola dana desa dengan baik.
2. Perangkat desa harus dapat memberikan informasi terkait penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan media seperti website desa. Kami ingin membuat informasi ini mudah diakses oleh orang-orang di dalam dan di luar desa.
3. Pemerintah desa diharapkan menjaga mekanisme transparansi dan pengelolaan uang yang baik di desa dan menjadi contoh bagi desa lain yang tidak menerapkan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya F. M, Sudana P. I. (2015). *Akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana. Bali.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Edisi Kesa)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2017. *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sector publik*. Edisi 2 (Cetakan Ketiga). Salemba Empat: Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka: Jawa Timur.
- H. Partini. 2018. “*Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*”. Makassar
- Kumalasari D, Riharjo B. I. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*. ISSN 2460-058. STIESIA Surabaya.
- Laksmi, A. C. (2015). *Continuing Professional Development For The Auditing Profession: Evidence From Indonesia*. RMIT University.
- McCracken, G. (1988). *The Long Interview*. Newbury Park: Sage Publications Inc.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Prasetyo, Andhika. 2017. “Menata Ulang Alokasi Dana Desa.” *Media Indonesia*. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa> (April 27, 2018).
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya*. Kencana: Jakarta

Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta.

———. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwardane, E.K. *Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata ISSN: 2301-6523 Vol. 4, No. 2, April 2015*

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Yuliansyah, Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Cetakan Kedua. Salemba Empat: Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2020 pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021

Peraturan Menteri Desa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN